



LAMPUNG SAI

FEBRUARI 2021 EDISI 2



LIPUTANKHUSUS

- Forkopimda Jadi Saksi Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
- Deklarasi Janji Kinerja di Seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Lampung

TOPIK UTAMA

- Komisi III DPR RI Lakukan Rapat Kerja dengan Kanwil Kemenkumham Lampung
- Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Oleh Tim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Sambutan Kakanwil



DANAN PURNOMO

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk negara, bekerja secara PASTI dan memberikan pelayanan yang prima.

Pada bulan ini akhirnya kita dapat menyelesaikan edisi kedua e-buletin. Adanya e-buletin ini, diharapkan semua kegiatan kita dapat terpublikasi dengan baik. Sehingga masyarakat luas semakin mengenal dan mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, untuk itu saya kembali mengingatkan, jangan pernah lengah dan terus menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!

PELINDUNG

Kepala Kantor Wilayah
DANAN PURNOMO

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi

IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian

HASANUDIN

Kepala Divisi Pemasarakatan

FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRANTONO

EDITOR

**ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA
WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA,
PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS**

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

**ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA
WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA,
PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS**

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-2 Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

E-Buletin ini memuat informasi seputar kegiatan dan kinerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi se Provinsi Lampung. Khusus dalam edisi ini, kami menyajikan liputan mengenai Deklarasi Janji Kinerja Tahun di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung Tahun 2021.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semangat pembaharuan akan selalu tertanam dalam jiwa tim redaksi, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.





DAFTAR ISI



HAL. 6

AWALI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TAHUN 2021 KE LAPAS KOTA AGUNG, KAKANWIL BERI PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI

Awali Kegiatan Kunjungan Kerja Tahun 2021 ke Lapas Kota Agung, Kakanwil Beri Penguatan Tugas dan Fungsi Pegawai 6

Kakanwil Kunjungi Lapas Gunung Sugih dan Lapas Metro berikan Penguatan Tugas dan Fungsi ASN..... 7



HAL. 8

KAKANWIL HADIRI APEL PAGI BERSAMA UPT PEMASYARAKATAN SE-BANDAR LAMPUNG, PENCAK SILAT DAN YEL-YEL MENJADI ATRAKSI PENUTUP

Kakanwil Hadiri Apel Pagi Bersama UPT Pemasarakatan Se-Bandar Lampung, Pencak Silat dan Yel-Yel Menjadi Atraksi Penutup..... 8

Resmi Lantik Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kakanwil Beri Arahan untuk Segera Berkoordinasi dan Beradaptasi..... 9

Jelang Pelaksanaan Deklarasi Janji Kinerja dan Penganangan Zona Integritas, Kakanwil kunjungi Polda, Ombudsman, Pengadilan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi Lampung 10

Jalin Sinergitas, Kantor Wilayah Lampung Lakukan Audiensi dengan Korem 043/ Gatam dan BNN Provinsi Lampung 11



HAL. 12

FORKOIMDA JADI SAKSI DEKLARASI JANJI KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM KANWIL LAMPUNG TAHUN 2021

FORKOIMDA Jadi Saksi Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kanwil Lampung Tahun 2021 12

Kakanwil Saksi Deklarasi Janji Kinerja dan Penganangan Pembangunan Zona Integritas Aparat Penegak Hukum Kab. Lampung Selatan..... 14

Kanwil Lampung Ikuti Deklarasi Janji Kinerja di Lapas Kelas IIA Metro, Serta Kunjungan Kerja ke Bapas Metro dan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih 15



HAL. 21

KOMISI III DPR RI LAKUKAN RAPAT KERJA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



HAL. 26

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG GELAR RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA



HAL. 28

PENGUATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM OLEH TIM PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI UPT se-Kota Bandar Lampung, Kakanwil Beri Arahan untuk Jalin Sinergitas dengan Instansi Lain. 17

Kakanwil Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM T.A 2020 dengan BPK Secara Virtual 18

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung Gandeng Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung Adakan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 19

Percepat Penyelesaian Permohonan Merek dan Pendaftaran IG, Kanwil Lampung Lakukan Koordinasi ke Direktorat Jendral KI..... 20

Komisi III DPR RI Lakukan Rapat Kerja dengan Kanwil Kemenkumham Lampung... 21

Tingkatkan Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Rakor dengan Instansi Terkait 23

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung Lakukan Klarifikasi Terhadap Notaris 25

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja 26

Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Oleh Tim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang..... 28

Kanwil Lampung Gelar Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Plt. Dirkamtib Ditjenpas Berikan Penguatan Terkait Keamanan Lapas/ Rutan di Masa Pandemi..... 30

AWALI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TAHUN 2021 KE LAPAS KOTA AGUNG, KAKANWIL BERI PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI

Mengawali kinerja di Tahun 2021 ini, selaku pembina Satuan Kerja di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo, melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung. Adapun kunjungan Danan ke Lapas Kota Agung adalah dalam rangka memberikan penguatan terkait tugas dan fungsi ASN Kementerian Hukum dan HAM sekaligus bersilaturahmi. Kedatangan Danan yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Lampung, Hadiyanto, disambut langsung oleh Kepala Lapas Kota Agung, Beni Nurachman dan Kepala Rutan Kota Agung, Achmad Sobirin.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (01/02/21) di Aula Serbaguna Lapas Kota Agung dihadiri oleh pejabat dan pegawai beserta para CPNS dari Lapas dan Rutan Kota Agung. Mengawali penguatannya, mengingat masa pandemi yang masih belum berakhir, Danan berpesan kepada semua, untuk senantiasa



mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Danan berpendapat pesatnya penyebaran COVID-19 dapat berasal dari perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan protokol tersebut,

Danan menyampaikan tujuannya mengunjungi Lapas Kota Agung. Selain untuk bersilaturahmi, Danan berharap kunjungannya dapat memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi para Insan Pengayoman di Lapas dan Rutan Kota Agung agar

senantiasa menjaga kondusifitas di satuan kerjanya masing-masing terutama terkait HALINAR. Pada kesempatan ini juga Danan menghimbau agar Lapas dan Rutan di Kota Agung kembali turut berkontribusi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Mengomentari kondisi Lapas Kota Agung, menurut Danan, secara postur Lapas Kota Agung sudah ideal untuk memperoleh predikat WBK.

Di hadapan para CPNS Angkatan 2019, Danan berpesan untuk senantiasa mematuhi aturan, menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kemampuan diri dan terus berinovasi.

Menjelang akhir kunjungannya di Lapas Kota Agung, Danan didampingi Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; bersama Kalapas Kota Agung, Beni Nurachman dan Karutan Kota Agung, Achmad Sobirin; menyempatkan diri untuk berkeliling lingkungan Lapas guna meninjau keadaan bangunan dan situasi warga binaan.



KAKANWIL KUNJUNGI LAPAS GUNUNG SUGIH DAN LAPAS METRO BERIKAN PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI ASN



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung beserta jajarannya hari ini Selasa (02/02/2021) melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunung Sugih dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

Pada kunjungan kerja ini, Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Para ASN diharapkan tetap waspada dalam melawan Covid-19, mengingat sudah ada beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang gugur karena covid. Kepala Kantor Wilayah juga menghimbau agar ASN terus menjaga kesehatan, jangan berkerumun, jangan melakukan kontak fisik dengan orang lain.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga berpesan pada 7 (tujuh) orang CPNS untuk selalu bersyukur karena terpilih dimasa pandemi dan ditengah - tengah banyaknya kasus PHK. Diharapkan CPNS yang telah diterima agar dapat menunjukkan inovasi, kemampuan, loyalitas, dan pengabdian yang diwujudkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, menumbuhkan rasa butuh pada lembaga, serta melaksanakan tugas dengan baik.

Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan informasi terkait kinerja, sesuai arahan menteri yang sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas, maka akan dilaksanakan deklarasi janji kinerja dan persiapan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Setelah dilakukan deklarasi janji kinerja akan dilanjutkan dengan target kinerja yang harus dilaksanakan. Kepala Kantor Wilayah juga berpesan

agar senantiasa menjaga lapas gunung sugih dengan baik, terutama dari permasalahan peredaran HP dan narkoba.

Penyalahgunaan HP untuk merekam tindak pidana kekerasan yg bisa membuat viral dan mencemarkan nama baik lapas, hal ini harus diwaspadai dan dilakukan tindak pencegahan. Karena meskipun ASN tidak melakukan tindak melakukan penyalahgunaan namun bisa mendapatkan hukuman tindak disiplin untuk ASN yang sedang bertanggungjawab di hari kejadian. Untuk petugas yang terlibat dalam peredaran narkotika maka akan mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat tanpa pesangon. Untuk itu diharapkan ASN waspada media sosial dan senantiasa menjaga nama baik lapas gunung sugih. Bangun lapas agar dapat menjadi kebanggaan dan contoh yang baik di masyarakat. Dalam kunjungannya di Lapas Kota Gunung Sugih, Danan didampingi Kepala Bagian Umum: Hadiyanto bersama dengan Kepala Lapas Kota Gunung Sugih: Denial Arif menyempatkan diri untuk berkeliling lingkungan Lapas guna meninjau situasi dan hasil kreasi warga binaan pemasyarakatan, sebelum bertolak ke Lapas Kelas II A Kota Metro.

Di Lapas Kelas II A Metro, Kepala Lapas: Muchamad Mulyana menyambut dengan hangat kedatangan Kepala Kantor Wilayah Bersama jajarannya. Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka menguatkan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung hari ini ditutup dengan kunjungan ke Lapas Kelas II A Kota Metro.



KAKANWIL HADIRI APEL PAGI BERSAMA UPT PEMASYARAKATAN SE-BANDAR LAMPUNG, PENCAK SILAT DAN YEL-YEL MENJADI ATRAKSI PENUTUP



Kegiatan Apel Pagi Bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Bandar Lampung digelar di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Selasa (09/02/2021) Kegiatan Apel Pagi Bersama ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pemasyarakatan: Farid Junaedi beserta Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas Kantor Wilayah Lampung dan Kepala UPT Pemasyarakatan se-Bandar Lampung.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Kakanwil, beliau menekankan kepada seluruh pegawai di Unit Pelaksana Teknis untuk selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam mengambil Tindakan. Hindari segala jenis kegiatan yang da-



pat berindikasi dengan peredaran narkoba serta penyalahgunaan Handphone yang dapat berakibat merugikan instansi. Sudah sepatutnya insan pengayoman dapat memegang penuh aturan tentang peniadaan handphone, pungli dan narkoba. Berikan atensi penuh terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan peredaran handphone dan narkoba dengan penggeledahan barang yang maksimal dan mem-

buat tim pengawas. Diakhir Kegiatan Apel Pagi Bersama, ditampilkan sebuah atraksi pencah silat dan Yel-yel dari Gabungan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung yang disaksikan oleh seluruh peserta Apel Pagi.



RESMI LANTIK ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS, KAKANWIL BERI ARAHAN UNTUK SEGERA BERKOORDINASI DAN BERADAPTASI

Pada Selasa (02/02/2021), mengambil tempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo, melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji Periode 2021-2023.

MPDN merupakan anggota dari suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Adapun ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang dilantik untuk periode ini adalah atas nama Gunawan dan Dina Sirait yang masing-masing memiliki pengalaman sebagai Sekretaris MPDN, memiliki latar belakang pengetahuan di bidang hukum, dan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan sebagai anggota MPDN.

“Keberhasilan saudara dalam menjalankan amanah ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kantor Wilayah Lampung, dan saya yakin saudara dapat menjalankan tugas jabatan secara professional”, pesan Danan.

“Segera lakukan koordinasi dan menyesuaikan diri dengan anggota MPDN lain, sehingga dapat segera menjalankan tu-



gasnya secara efektif dan solid”, ujar Danan mengarahkan.

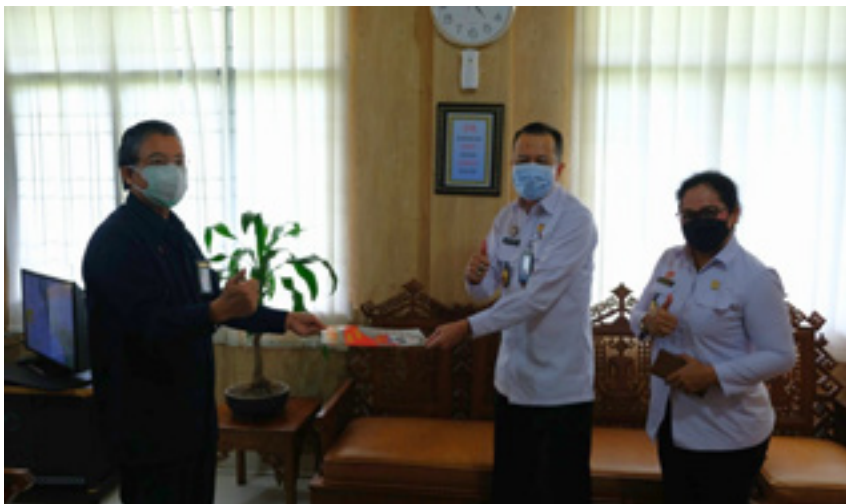
Dalam sambutannya juga, Kepala Kantor Wilayah berpesan agar anggota MPDN dapat memberikan kontribusi positif dan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Danan juga berharap agar anggota MPDN dapat menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, guna

menjaga marwah dan profesionalisme jabatan Notaris di Provinsi Lampung, serta memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas layanan jasa Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



JELANG PELAKSANAAN DEKLARASI JANJI KINERJA DAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS, KAKANWIL KUNJUNGI POLDA, OMBUDSMAN, PENGADILAN TINGGI, DAN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG



Dalam rangka mempersiapkan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, pada hari ini Selasa (03/02/21) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP; dan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto secara serentak mengunjungi Polda, Ombudsman, Pengadilan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Dalam kunjungan kerja ini disampaikan juga undangan kepada Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan Kepala Ombudsman RI untuk dapat menghadiri kegiatan "Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung" yang akan dilaksanakan pada Rabu, 10 Februari 2021 mendatang.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat bekerjasama dan bersinergi dengan instansi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga WBK dan WBBM segera tercapai.



JALIN SINERGITAS, KANTOR WILAYAH LAMPUNG LAKUKAN AUDIENSI DENGAN KOREM 043/GATAM DAN BNN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka menjalin sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan audiensi ke Korem 043/Gatam dan BNN Provinsi Lampung, Kamis (04/02). Kantor Wilayah diwakili oleh Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedididampingi oleh Kalapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung, Kunrat Kasmiri. Selain berkoordinasi mengenai topik yang terkait dengan Pemasarakatan, kunjungan kali ini sekaligus meminta dukungan untuk Kantor Wilayah Lampung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Dalam kunjungan ke Korem 043/Gatam, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedididisambut baik oleh Kasrem 043/Gatam, Kolonel Inf. Dwi Endrosasongko. Pertemuan antara Kanwil Kemenkumham Lampung dengan Korem 043/Gatam ini mendiskusikan terkait keamanan khususnya dalam menekan pemahaman radikal bagi narapidana terorisme di Lapas/Rutan. Sehingga, kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kerjasama di bidang Pengamanan dan Pembinaan terhadap Narapidana Lapas/Rutan Lampung. Tidak lupa, Kadivpas meminta dukungan untuk Kanwil Kemenkumham Lampung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Selanjutnya, Kadivpas melanjutkan lawatannya ke Kan-



tor BNN Provinsi Lampung. Lawatan kali ini disambut langsung oleh Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Pol. Jafriedi. Pertemuan ini membahas mengenai permasalahan untuk menekan peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini sinergitas antara kedua instansi dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba demi terwujudnya

masyarakat bersih penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Lampung. Selain itu, Brigjen Pol. Jafriedi juga menyampaikan dukungannya kepada Kanwil Kemenkumham Lampung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dengan terwujudnya Zona Integritas di Lapas/Rutan, beliau berharap dapat menekan peredaran dan tingkat pemakaian narkoba.



FORKOPIMDA JADI SAKSI DEKLARASI JANJI KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM KANWIL LAMPUNG TAHUN 2021



Rabu (10/02/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Kegiatan ini turut mengundang Pemerintahan Provinsi Lampung dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FOR-KOPIMDA) Lampung beserta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Para Pimpinan Tinggi Pratama turut serta dalam kegiatan ini.

Acara dimulai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tingkat Unit Pelaksana Teknis antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Wilayah Lampung.

Dilanjutkan dengan Penandatanganan antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi. Dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dilanjutkan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penyerahan Piagam Penghargaan Kepala Kantor Wilayah Bersama Gubernur Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Sambutan Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ir. FREDY SM., M.M. selaku Inspektur Provinsi Lampung Beliau memberikan apresiasi penuh dengan terselenggaranya acara Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang telah di Deklarasikan dan dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan tema "KUMHAM LEBIH PASTI". Karena membangun Zona Integritas merupakan hal yang sangat penting sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Harapannya dengan Kerjasama ini, diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum sehingga dunia usaha dapat berkembang sebagaimana yang menjadi target pembangunan ke depan, khususnya di Provinsi Lampung.



Sementara dalam sambutan Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengapresiasi semangat pencanangan zona integritas WBK dan WBBM. Beliau berharap Zona Integritas ini bukan hanya pencanangan secara formalitas belaka namun juga merupakan komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk menjadi lebih baik.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah menjelaskan bahwa Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 merupakan agenda yang dilaksanakan apda setiap awal Tahun untuk menguatkan komitmen kerja Kami PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif.

Beliau juga meminta dukungan dari seluruh instansi terkait Pemerintah Provinsi Lampung dan FORKOPIMDA LAMPUNG. Ditutup dengan Ajakan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta FORKOPIMDA, sehingga di dalam pelaksanaan tugas, akan terwujud Kepastian Hukum dalam pelayanan masyarakat. Sebelum Rangkaian Acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2021 berakhir para hadirin melakukan dokumentasi foto Bersama.



KAKANWIL SAKSI DEKLARASI JANJI KINERJA DAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM KAB. LAMPUNG SELATAN



Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Aparat Penegak Hukum Kabupaten Lampung Selatan diselenggarakan secara serentak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Senin (22/02/2021).

Di Aula Lapas Kalianda, Aparat Penegak Hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Imigrasi di Lampung Selatan turut menandatangani Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas sebagai wujud Komitmen Bersama Membangun Zona Integritas di Lampung Selatan.

Tak hanya itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Plh. Bupati Lampung Selatan, Thamrin, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf turut menjadi saksi acara Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Aparat Penegak Hukum Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam Sambutan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa dalam komitmen bersama tidak hanya sebatas mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) semata.

"Kita harus menjaga komitmen, tidak hanya sebatas WBK/WBBM, tetapi harus maksi-

mal terhadap pelayanan masyarakat, itu kunci," ucapnya.

"Juga, pengguna Pelayanan harus diperhatikan, supaya bisa memberikan penilaian yang baik," pungkasnya.

Selanjutnya Danan Purnomo menuturkan bahwa wujud sinergitas ini merupakan hal baik yang terjalin di antara Penegak Hukum di Lampung Selatan yang harus selalu ditegakkan.

"Kegiatan ini merupakan wujud di dalam rangka kerjasama Sinergitas yang baik di antara Penegak Hukum Lampung Selatan yang wajib harus diteruskan," tutur Danan.

"Utamanya bukan tentang kita meminta untuk ditetapkan menjadi WBK, tetapi kita harus meningkatkan kualitas pelayanan, mereformasi Penataan Ruang Birokrasi, dan bagaimana kita menghilangkan KKN," tutup Kakanwil Kemenkumham Lampung.

Di sela Acara kegiatan, Aparat Penegak Hukum yang tergabung sebagai Criminal Justice System di Lampung Selatan meluncurkan Aplikasi SIMANTAN (Sistem Informasi Monitoring Administrasi Tahanan). Yang berfungsi untuk Menangani Overstaying di Lampung Selatan.



KANWIL LAMPUNG IKUTI DEKLARASI JANJI KINERJA DI LAPAS KELAS IIA METRO, SERTA KUNJUNGAN KERJA KE BAPAS METRO DAN LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH



Senin (22/02/21) Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ida Asep Somara mewakili Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Sub Bagian Program & Pelaporan, Gunawan Ali menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja di Lapas Kelas IIA Metro.

Kegiatan ini dihadiri juga PLH Walikota Metro diwakili oleh Asisten I, Ridwan; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Metro, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro Yunizar Kilat Daya; Ketua Ombudsman Perwakilan Lampung, yang diwakili oleh Atika Mutiara; Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Riki Sapta Taringan; Wakil Kapolres Metro, KOMPOL Gusti Iwan Wijaya; Dandim 0411/LT Metro yang diwakili oleh Asdim Bagus; Kepala BNNK Kota Metro, Saut Siahaan; Kalapas Kelas IIA Metro, Mucha-

mad Mulyana; Kabapas Kelas II Metro, Sukir; dan Plt Karupbasan Kelas II Metro, Rohmadi.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari walikota, yang berpesan semoga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dapat terus melaksanakan WBK dan WBBM ini dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, ombudsman juga turut mengingatkan bahwa evaluasi kinerja untuk terus berinovasi agar terwujud pelayanan yang prima dan bersih.

Kalapas Metro juga menyampaikan bahwa Lapas kelas II A metro pernah mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun 2018, pada tahun ini 2021, lapas metro, rupbasan metro dan bapas metro bertekad untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM kembali. Kalapas juga mengucapkan apresiasinya kepada pihak

yang turut mendukung kinerja lapas, bapas, dan rupbasan Metro.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Kalapas Kelas II A Metro, Kabapas Kelas II Metro, Plt. Karupbasan Kelas II Metro dan sebagai saksi Walikota metro, Forum Komunikasi Daerah Kota Metro, Ketua Ombudsman Perwakilan Lampung, Ketua PN Metro, Kepala Jaksa Negeri Metro, Kapolres Metro, Dandim 0411/LT Metro, Kepala BNNK Kota Metro dan ditutup dengan penandatanganan oleh Kepala Divisi Administrasi.

Pada kesempatan ini Kepala Divisi Administrasi berpesan untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan integritas serta menjadi ASN yang bisa memberikan keteladanan, memiliki sikap yang ramah dan





kantor wilayah, Kepala Divisi Administrasi melakukan kunjungan ke Lapas kelas IIB Gunung Sugih. Dalam kunjungannya, Kepala Divisi Administrasi disambut oleh Kepala Lapas kelas IIB Gunung Sugih, Denial Arif. Kalapas menyampaikan laporannya terkait Deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan pagi ini, untuk penandatanganan akan dilakukan menyusul dengan mengunjungi kantor-kantor saksi. Kalapas juga menyampaikan bahwa di lapas gunung sugih mendapatkan tambahan 7 CPNS, dengan formasi 5 Orang Penjaga Tahanan Pria, 1 Orang Penjaga Tahanan Wanita, dan 1 Orang Perawat.

Pada kesempatan ini, selain menguatkan tugas dan fungsi pegawai, Kepala Divisi Administrasi juga mengingatkan kembali terkait masalah pungli, peredaran narkoba, dan peredaran, penyewaan serta penyalahgunaan handphone di dalam lapas. Kepala Divisi Administrasi juga mengingatkan bahwa akan diberlakukan sanksi tegas. Buatlah agar media tidak bisa membuat berita buruk tentang Lapas Gunung Sugih. Akan diberlakukan peraturan untuk penggunaan handphone, dimana pegawai tidak diperkenankan membawa masuk handphone ke area steril, handphone akan dititipkan di tempat khusus. Jadikan Lapas Gunung Sugih memiliki akuntabilitas yang tinggi dan kinerja yang pasti. Acara kunjungan ditutup dengan kunjungan ke lingkungan lapas di temani oleh Kalapas. Sambil melaporkan kondisi lingkungan, Kalapas juga menginformasikan rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya

ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Divisi Administrasi Juga mengingatkan agar tetap waspada terhadap pungli dan peredaran narkoba yang dikendalikan napi dalam lapas dan juga penyalahgunaan handphone di dalam lapas. Kantor wilayah berkomitmen untuk menindak tegas pegawai yang terkait dalam peredaran narkoba maupun handphone. Sanksi keras akan diberlakukan berupa mutasi antar provinsi maupun pemberhentian secara tidak hormat.

Setelah acara Deklarasi Janji Kinerja ini, Kepala Divisi Administrasi juga melakukan kunjungan kerja ke kantor Bapas kelas II Kota Metro. Dalam kunjungannya, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan arahan kepada Kabapas untuk terus melakukan perbaikan sarana prasarana dan sistem kerja di lingkungan kantor. Kepala Divisi Administrasi juga berpesan kepada para CPNS untuk selalu bersyukur dan senantiasa bekerja dengan integritas dan memberikan yang terbaik. Sebelum bertolak kembali ke



DEKLARASI JANJI KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI UPT SE-KOTA BANDAR LAMPUNG, KAKANWIL BERI ARAHAN UNTUK JALIN SINERGITAS DENGAN INSTANSI LAIN



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo menghadiri Acara Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 di jajaran unit pelaksana teknis se-Kota Bandar Lampung, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lapas I Bandar Lampung dihadiri oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Staf Ahli Bidang Masyarakat dan SDM yang mewakili Walikota Bandar Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kapolresta Bandar Lampung, Kasdim yang mewakili Dandim 0410 Bandar Lampung, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kabid P2M Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Prosesi penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 dilakukan secara digital dan

juga disiarkan secara langsung melalui video conference.

Dalam sambutannya Nurrohman Yusuf selaku Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mengapresiasi usaha dan kerja keras yang dilakukan dan terus mendorong kepada Kanwil Kemenkumham untuk terus berusaha mencapai zona Integritas

“Komitmen bersama ini bukan hanya sekedar seremoni melainkan momentum memperbaiki kinerja berkomitmen serius dalam menguatkan kualitas akuntabilitas, pemerintahan yang bersih dari KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.” ujarnya

Pada kesempatan kali ini dalam sambutan tertulis Seraden selaku Staf Ahli Bidang masyarakat dan SDM perwakilan Walikota Bandar Lampung menyampaikan “Lembaga Masyarakat adalah

Lembaga yang berhadapan langsung dengan warga binawan yang sangat rentan dengan gangguan, tetapi tidak menjadikan gangguan tersebut suatu hambatan dalam menciptakan suatu miniatur implementasi Reformasi Birokrasi, dan semoga dapat membentuk profil dan karakter yang kuat dalam berintegritas sehingga dapat menjadi contoh bagi satuan kerja yang lain.” ujarnya,

Danan Purnomo selaku Kakanwil Kemenkumham Lampung juga menambahkan

“Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kembali target dan action plan yang telah dicanangkan agar terlaksana tepat waktu, serta pembangunan zona integritas tidak dapat kita berjalan sendiri melainkan memerlukan sinergi dengan institusi lainnya.” Pungkasnya.



KAKANWIL IKUTI ENTRY MEETING PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM T.A 2020 DENGAN BPK SECARA VIRTUAL

Kamis (11/02), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menghadiri acara tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo; Kepala Divisi Yankumham, Nur Ichwan; Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; Kasubbag Keuangan dan BMN, Arya Dwijayanti; serta mengundang Ka UPT se-Bandar Lampung. Pada Entry Meeting ini, tim BPK dipimpin oleh Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly. Dalam pembukaannya beliau menyambut tim BPK RI dan mengharapkan seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik di tingkat pusat maupun tingkat kantor wilayah memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan tim BPK RI secara jelas, akurat, dan akuntabel. Beliau yakin, ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya. Beliau juga berpesan, apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, agar segera melakukan komunikasi dengan tim BPK RI.

Selanjutnya, Yasona H Laoly berharap bahwa opini WTP ini dapat diraih kembali secara berturut-turut, hingga mampu memperoleh penghargaan 15 kali atau 20 kali. Yang terakhir, Beliau mengucapkan selamat bekerja kepada Tim Pemeriksa BPK RI dan seluruh Tim Pengelola Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau juga berharap semoga upaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kita semua mampu membuahkan hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimasa sekarang dan masa yang akan datang.



Selanjutnya Bapak Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I, beliau menyampaikann bahwa jenis pemeriksaan BPK ada tiga, yaitu: keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2020 dengan memperhatikan: kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Kami mempunyai standar dalam melakukan pemeriksaan yaitu SPKN, dan salah satu standar yang paling penting disamping banyak lagi standar-standar yang lain adalah komunikasi yang efektif", Ujar Hendra



SEKRETARIS KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG GANDENG TIM PENYULUH HUKUM KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG ADAKAN SOSIALISASI PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2020



Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung Bapak Drs. H. Mikdar Ilyas, MM dengan menggandeng Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Desa Pagar Dewa Suka Mulya, Kec. Pagar dewa, Kab. Tulang Bawang Barat pada Sabtu (13/02/2021).

Acara dibuka oleh Bapak Mikdar dan dilanjutkan dengan pemberian materi tentang Perda Provinsi Lampung oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Lampung yang disampaikan oleh Melda Sulastriyawati dan Robi Awaludin. Pada materi pertama tentang Perda Nomor 3 Tahun 2020 ini jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan

adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan covid 19. Tujuan Peraturan ini diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan ke daruratan kesehatan masyarakat; mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah. Hal ini merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Saat ini pemerintah sedang melakukan program pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk itu kita semua wajib mendukung terlaksananya program terse-

but guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ditegaskan pula terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan. Terdapat sanksi bagi setiap orang, penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggarnya. Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, denda administratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Yetno dalam kesempatan ini menyampaikan informasi terkait bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di provinsi Lampung. Jenis Bantuan hukum yang diberikan yaitu Litigasi dan Non Litigasi baik Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Syarat memperoleh bantuan hukum diantaranya melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta dokumen lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masyarakat Suka Mulya Pagar Dewa menyambut hangat kegiatan sosialisasi yang di laksanakan oleh anggota dewan dan Kanwil Kemenkumham Lampung.



PERCEPAT PENYELESAIAN PERMOHONAN MEREK DAN PENDAFTARAN IG, KANWIL LAMPUNG LAKUKAN KOORDINASI KE DIREKTORAT JENDRAL KI

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Nur Ichwan bersama dengan Kepala Bidang Hukum, Ignatius Mangantar Tua Silalahi; Kepala Sub Bidang Pelayanan KI, Adil Jaya Negara; Analis Permohonan KI, Nanta Fenomena; dan Tenaga Administrasi, Agus Kamim melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada Senin (15/02/21) bertempat di Jakarta.

Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian permohonan merek dan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Magis Saburai Tanggamus. Koordinasi ini dilakukan selama 3 hari dari hari Minggu (14/02/21) hingga hari Selasa (16/02/21). Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, proses permohonan merek dan pendaftaran Indikasi Geografis segera terselesaikan.



KOMISI III DPR RI LAKUKAN RAPAT KERJA DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



Rabu (17/02/2021), bertempat di Lembaga Masyarakat Kelas I Bandar Lampung, Komisi III DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham Lampung yang dipimpin oleh Adies Kadir (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar) dengan anggota Heru Widodo (Fraksi PKB), Ary Egahni Ben Bahat (Fraksi Nasdem), Rudy Mas'ud (Fraksi Golkar), Hinca IP Pan-

djaitan (Fraksi Demokrat) dan Taufik Basari (Fraksi Nasdem). Dalam kunjungannya Komisi III DPR RI disambut oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo yang juga didampingi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi Provinsi Lampung.

Dalam rapat kunjungan kerja ini, Kakanwil menjelaskan tentang kondisi umum Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugasnya. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kondisi anggaran serta capaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik yaitu sebesar 95,91%.

Pada tahun 2021 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menerima anggaran yang akan dipergunakan untuk program prioritas mulai dari pembangunan Lapas, pembangunan gedung Kanwil untuk pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, harmonisasi peraturan daerah yang berkualitas, pelayanan publik dibidang hukum, mendukung penegakan hukum dan melaksanakan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di Provinsi Lampung,



menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan serta melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Disampaikan juga tentang pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kondisi jumlah tenaga pengamanan, serta keadaan Lapas dan Rutan yang membutuhkan rehab gedung maupun bangunan. Kanwil Kemenkumham Lampung juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran Narkoba.

Dalam hal pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan, Kanwil telah menyampaikan laporan secara rutin kepada Gugus Tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19 di Lapas/Rutan melalui sosialisasi, rapid-test, pemenuhan penambah daya tahan tubuh, pembatasan kunjungan dan sidang online dengan video call serta asimilasi narapidana.

Sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan di seluruh satker keimigrasian tetap berjalan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dan lapangan. Disamping itu Kanwil Kemenkumham Lampung juga telah membentuk tim pengawasan orang asing (tim pora) mulai dari tingkat provinsi hingga



tingkat kecamatan yang beranggotakan dari berbagai unsur instansi baik pusat maupun daerah

Dalam Rapat Kerja ini Komisi III DPR RI memberi masukan kepada Kanwil seperti rehabilitasi untuk pengguna narkoba guna mengurangi over kapasitas, penyiapan ruang persidangan online yang me-

madai pada setiap Lapas maupun Rutan, tetap menerapkan layanan Eazy Passport untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak – pihak terkait guna meningkatkan kinerja pada Lapas, Rutan, dan Kantor Imigrasi.



TINGKATKAN SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG SELENGGARAKAN RAKOR DENGAN INSTANSI TERKAIT



Pada Selasa (23/02/21), bertempat di Golden Hill Ballroom Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Daerah Tahun 2021 yang pada tahun ini mengangkat tema: "Melalui Rapat Koordinasi Kita Wujudkan Sinergitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah".

Mengawali kegiatan, Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia O. Pakpahan selaku panitia pelaksana, menyampaikan bahwa tujuan terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk:

Membangun sinergitas antar instansi terkait dalam pembentukan Produk Hukum di Provinsi Lampung; Mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pe-

merintah daerah (biro/bagian hukum dan OPD Pemrakarsa) dalam pembentukan peraturan daerah serta solusi dari permasalahan tersebut; Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui fungsi perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum di Daerah.

Hadir dalam kegiatan rakor ini Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Lampung, para narasumber, serta para peserta yang berasal dari pemerintah daerah (PEMDA), sekretaris dewan (DPRD) dan satuan organisasi (OPD) terkait.

Mengawali sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, yang juga mewakili Kepala Kantor Wilayah, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi dengan Instansi di Daerah ini bertujuan untuk memberikan



pemahaman mengenai perlunya sinergitas antara Instansi dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan produk hukum di daerah. Karena masih terdapat anggapan bahwa peraturan daerah hanya sebatas formalitas.

“Sering kita menjumpai paradigma berpikir yang masih memandang peraturan daerah sebagai naskah atau dokumen yang dibuat sebatas formalitas saja.” ungkap Nur Ichwan. Selain itu sinergi dalam pembentukan peraturan daerah tersebut juga menjadi amanah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyusunan peraturan daerah.

Nur Ichwan berharap Rapat Koordinasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan sebuah peraturan daerah baik secara kuantitas maupun kualitasnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan peraturan daerah yang mampu melayani masyarakat dan memberikan kepastian hukum, menjaga komitmen pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, mengakomodir perubahan zaman dan teknologi, serta dapat mengikuti irama dinamika sosial yang semakin terbuka lebar sebagai konsekuensi pergaulan masyarakat global.

Kegiatan rakor dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber yang terdiri dari: Ali Badary, SH., MH., Perancang PerUU Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dengan topik: Mekanisme Pengharmonisasian, Pembu-



lutan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; Erman Syarif, SH., MM., Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan topik: Sinergitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah yang Berkualitas; dan Ibnu Hajar, SH.,

MH., Kepala Bagian Persidangan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, dengan topik: Sinergitas DPRD dengan Instansi Terkait Dalam Mewujudkan Dalam Upaya Mewujudkan Produk Hukum yang Berkualitas. Dengan dimoderatori oleh JFT Muda, Gunawan.



MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI LAMPUNG LAKUKAN KLARIFIKASI TERHADAP NOTARIS

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung mengadakan klarifikasi terhadap notaris terkait dengan permohonan pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Rapat Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Rabu (24/02). Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purmono, S.H., M.Si. yang mewakili unsur Pemerintahan. Mewakili unsur Ahli/Akademisi hadir Prof. DR. Maroni, S.H., M.Hum. serta Chairul Anom, S.H., Ayi Ruhayat, S.H. dan Zul April, S.H. mewakili unsur notaris.

Kegiatan ini meliputi klarifikasi notaris berkaitan dengan permohonan pihak kepolisian. Setelah pemeriksaan dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat pleno hasil pemeriksaan dan klarifikasi.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG GELAR RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung gelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja tahun 2020 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung pada Selasa (23/02/2021). Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Program dan Humas Basnamara, Kepala Bagian Umum Hadiyanto, bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi se Provinsi Lampung.



Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara. Dalam laporannya Basnamara menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan pencapaian keluarannya termasuk

relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan saat ini.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara. Ida Asep menyampaikan siklus evaluasi, tujuan, fungsi hingga indikator evalu-

asi kinerja. Disampaikan juga nilai indikator pelaksanaan anggaran dan monitoring nilai implementasi SMART dari masing-masing satuan kerja.

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian paparan evaluasi dan capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja. Pada sesi pertama yang me-



nyampaikan paparan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, dan diakhiri oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Bandar Lampung. Di akhir sesi Kepala Divisi Administrasi memberikan tanggapan terhadap paparan yang telah disampaikan dari masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Hari Kedua

Pada sesi selanjutnya di hari Rabu (24/02/2021) Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda dilanjutkan dengan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Metro, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Kotabumi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waykanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui, Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi, Lemba-



ga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.

Hari Ketiga

Hari Ketiga Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung resmi ditutup. Rabu (25/02/2021) Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Lampung, ditutup langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo. Turut hadir Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, Para Pejabat

Administrator dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Lampung.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang wajib kita laksanakan sebagai komitmen kita sebagai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah tahun 2020 berakhir, artinya selama 12 bulan kita telah melaksanakan target kinerja yang telah kita susun diawal tahun 2020.



PENGUATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM OLEH TIM PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG



Bertempat di Aula, Kanwil Kemenkumham Lampung adakan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Oleh Tim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Tim diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, para Pejabat Administrator bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi se Provinsi Lampung pada Rabu (24/02/2021).

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo sekaligus membuka kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 26 satuan kerja telah diajukan untuk mengikuti seleksi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, 25 diajukan untuk WBK dan 1 untuk WBBM namun belum ada yang lolos dalam proses seleksi. Untuk itu Danan berharap dengan adanya acara Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Tim dari Pengadilan Tinggi dapat membagikan





pengalaman serta kiat-kiat dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2021.

Materi pertama disampaikan oleh Suprabowo, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengenai Strategi Pembangunan ZI. Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Diah Sulastris Dewi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengenai Langkah-Langkah Kegiatan Strategis Area 1 Manajemen Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM.

Materi ketiga disampaikan oleh Sofia Dewi, S.E., M.S.Ak, Kasubag Keuangan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengenai Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Area 5 mencakup Pengendalian Gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat dan WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Kepatuhan LHKPN. Diakhiri dengan materi mengenai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Permenpan No 14 Tahun 2017 yang disam-

paikan oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh dalam SKM adalah Persiapan, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Penyusunan Laporan, dan Penyampaian Laporan.

Tim Pengadilan Tinggi juga menyampaikan kiat-kiat seperti memupuk kebersamaan dan kerjasama untuk bersama-sama bekerja mewujudkan WBK/WBBM, Memberikan data dukung yang selalu up-to-date, dalam membuat paparan lebih menarik dan kreatif, serta membentuk team khusus inovasi. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara Satker dengan para pemateri mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian WBK maupun WBBM serta kiat-kiat dalam menghadapinya. Pada akhir kegiatan dilakukan foto bersama antara peserta dengan Tim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.



KANWIL LAMPUNG GELAR RAPAT KERJA TEKNIS PEMASYARAKATAN, PLT. DIRKAMTIB DITJENPAS BERIKAN PENGUATAN TERKAIT KEAMANAN LAPAS/RUTAN DI MASA PANDEMI



Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2021 dengan mengusung tema "Implementasi Pelaksanaan 3 (tiga) Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung". Kamis (25/02/2021). Plt. Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Abdul Aris hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini.

Di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo Bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Para Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan juga Pejabat Struktural dari UPT Pemasyarakatan.

Dimulai dengan pembacaan Laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Yuniarto.

Dilanjutkan dengan pembukaan dari Kepala Kantor Wilayah, yang menjelaskan tentang pelaksanaan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, UPT dapat menerjemahkan dengan Langkah-langkah dan upaya nyata yang bisa dilaksanakan secara terukur dan dapat dimonitor serta dievaluasi.

Danan meminta Langkah-langkah dalam upaya deteksi dini gangguan kamtib dengan memanfaatkan sarana yang ada, penempatan petugas yang memiliki integritas, sosialisasi terhadap pengunjung terkait tata tertib kunjungan, pengawasan terhadap narapidana yang melaksanakan asimilasi, larangan membawa handphone ke area steril,





menyelenggarakan fungsi tim intelijen, melengkapi fasilitas cctv pada titik rawan, optimalisasi wartel khusus lapas, pemeriksaan bahan makanan, pengawasan terhadap kunjungan instansi luar, penggeledahan secara SOP, dan Sosialisasi dan internalisasi tentang bahaya narkoba.

Kepala Kantor Wilayah mengharapkan dengan Langkah-langkah tersebut Kepala UPT dapat memonitoring, mengevaluasi dan memberikan laporan ke Kantor Wilayah.

Dilanjutkan dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, menerangkan Upaya Strategis dalam rangka penanganan Covid-19

terkait Penanganan overstay pada Rutan, Kerjasama stakeholder untuk pelatihan keterampilan, penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba, pemberdayaan masyarakat untuk keadilan restorative, dan meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan terhadap gangguan kamtib. Farid juga mengharapkan Wali Pemasyarakatan di UPT dapat berjalan dengan baik sehingga narapidana mendapatkan pembinaan sejak awal dan meningkatkan pemahaman narapidana terhadap lingkungan barunya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Plt. Direktur Keamanan dan Ketertiban Di-

rektorat Jenderal Pemasyarakatan tentang perintah harian Dasa Adi Brata Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP, mewujudkan kewibawaan institusi pemasyarakatan dalam rangka Good Governance, meningkatkan kedisiplinasn dan kinerja, menjunjung integritas, bekerja secara professional.

Abdul Aris juga menegaskan agar Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi, membuat laporan atensi kepada pimpinan, memberikan counter berita negative, membangun sinergitas dengan Forkopimda dan dapat mewujudkan kekompakan dan solidaritas Korps Pemasyarakatan.

Acara ditutup dengan Forum Group Discussion tentang masalah-masalah apa saja yang berada di UPT jajaran Kantor Wilayah Lampung.



PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

JAGA JARAK

Tetap memperhatikan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 meter saat berhadapan dengan orang lain.



GUNAKAN MASKER

Saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. HINDARI tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

CUCI TANGAN

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.



AYO! PAKAI MASKER

KENAKAN MASKER ANDA DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA

CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI SENDIRI



DANAR PURNOMO
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAMPUNG

Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
<http://bit.ly/borangasukemas>

**BANTU KAMI MEMBENAHAI LAYANAN
DENGAN BERPARTISIPASI DALAM
SURVEI BERIKUT**



Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah

SURVEI KUALITAS PELAYANAN
<https://survei.balitbangham.go.id/ly/ROCP7k6H>